p-ISSN 2302-5476
e-ISSN 2579-3934

Membangun Teologi Publik Dalam Konteks Masyarakat Kepulauan: Contoh Kasus Gereja Masehi Injili di Timor

Binsar Jonathan Pakpahan [a,1]

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta [a]

b.pakpahan@stftjakarta.ac.id [1]

Submitted: 20-10-2022
Accepted: 16-03-2023
Published: 18-04-2023

Keywords:

Teologi publik, kepulauan, model teologi publik, kepulauan pasifik, Gereja Masehi Injili di Timor

Abstract

The model of public theology in the context of the island community must be connected with their specific needs. Based on the available models, the research will build an argument for a public theology for island communities. This paper shows the public theology models put forward by E. Harold Breitenberg Jr. and Eneida Jacobsen through literature research. Breitenberg argues that theology in the public sphere should be communal. Jacobsen provides several models of how theology is present in the public sphere: disclosure (clearly shows its theological understanding and languages), universal (using the language that the public understands but does not strongly indicate its theological background), and factual (theology shows their stance in actual actions). By exploring the context of the pacific islands and Evangelical Christian Church in Timor, which is located in the islands of the province of East Nusa Tenggara, this article shows that the model of theology in the context of the archipelago (island) is a communal model that displays its theological languages (disclosure) and at the same time also by real action (factual). Evangelical Christian Church in Timor has a solid theological foundation in their Pokok-pokok Eklesiologi GMIT to be involved in the public discussion on poverty and the need to build a more concentrated talk on eco-theology.

Abstraksi

Konsep berteologi publik apa yang sesuai dengan masyarakat kepulauan juga harus disesuaikan dengan konteks spesifik tersebut. Penelitian ini akan membangun sebuah argumen untuk sebuah teologi publik bagi masyarakat kepulauan berdasarkan pilihan model berteologi yang ada. Melalui penelitian kepustakaan, makalah memperlihatkan beberapa model

DOI: https://doi.org/10.24071/jt.v12i01.5272
W: http://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt | E: jurnal-teologi@usd.ac.id

This work is license under CC BY-SA
Creative Common Attribution-ShareAlike 4.0 International License

berteologi dari E. Harold Breitenberg Jr. dan Eneida Jacobsen. Breitenberg berargumen bahwa teologi di ruang publik harusnya bersifat komunal, dan Jacobsen memberi beberapa model cara teologi hadir di ruang publik: disclosure (secara jelas menunjukkan bahasa teologis), universal (berbahasa yang dipahami publik, namun tidak menunjukkan secara kuat latar belakang teologisnya), dan factual (berkarya secara nyata). Melalui penelusuran konteks Gereja Masehi Injili di Timor yang berada di kepulauan provinsi Nusa Tenggara Timur, makalah ini menunjukkan bahwa model berteologi di konteks kepulauan adalah model komunal yang menampilkan teologinya secara nyata (disclosure) dan pada saat yang sama juga mengerjakan karya nyata di jemaat (factual). Gereja Masehi Injili di Timor sudah memiliki landasan teologi yang kuat dalam Pokok-pokok Eklesiologi GMIT yang mendorong mereka untuk terlibat dalam percakapan mengenai kemiskinan dan membangun percakapan lebih serius mengenai ekoteologi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Situasi geografi Indonesia membuatnya memiliki banyak perbedaan seperti cuaca, tiga lempeng tektonik yang bersinggungan yaitu Eurosian, Pasifik, dan Indo-Australi yang membuatnya memiliki banyak gunung berapi aktif dan daerah yang subur, dan faktor arus dan angin.[1] Semua faktor di atas kemudian membentuk berbagai perbedaan yang akhirnya memengaruhi struktur sebuah masyarakat, mata pencarian, dan cara mereka menyelesaikan masalah.

Untuk memberi penjelasan mengenai ciri masyarakat kepulauan, dia harus dipisahkan dari masyarakat maritim.[2] Masyarakat maritim bisa dipahami sebagai masyarakat yang banyak memaksimalkan sumber daya laut sebagai sumber kehidupannya yang utama, misalnya sebagai nelayan atau memaksimalkan laut sebagai jalur perdagangan. Masyarakat maritim bisa juga disebut sebagai masyarakat bahari. Sementara itu, masyarakat kepulauan lebih memaksimalkan sumber di darat untuk mata pencariannya. Sebuah negara maritim akan memaksimalkan laut yang ada dalam wilayahnya, menciptakan jalur perdagangan laut dan banyak Pelabuhan, serta menggunakan Angkatan Laut untuk pertahanan. Pada 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan program Indonesia

[1] Singgih Tri Sulistiyono and Yety Rochwulaningsih, "Contest for Hegemony: The Dynamics of Inland and Maritime Cultures Relations in the History of Java Island, Indonesia," *Journal of Marine and Island Cultures* 2, no. 2 (2013): 116–18, https://doi.org/10.1016/j.imic.2013.10.002.

[2] Setelah membaca dan menganalisis beberapa artikel serta buku yang ditulis dalam topik kemaritiman dan kepulauan, saya menemukan bahwa beberapa artikel tidak membedakan kemaritiman dan kelautan seperti Mukhlis dan Setyadiharja serta Kambey et.al., yang menyamakan kebudayaan maritim dengan kebudayaan kelautan dan paradigma kepulauan, Suhardi Mukhlis and Rendra Setyadiharja, "Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim di Provinsi Kepulauan Riau untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 2, no. 1 (2017): 40; Melinda A. Kambey, Djuwita R.R. Aling, and Christian R. Dien, "Eksistensi Budaya Maritim Kelompok Nelayan Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* 8, no. 1 (2020): 138.

sebagai Poros Maritim Dunia dengan definisi di atas.[3]

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, gereja-gereja di Indonesia juga terpanggil untuk ikut memberi suara di ruang publik. Teologi publik tidak memiliki model yang sama karena sangat tergantung dari konteks dan model yang dipilih untuk menghadapi konteks tersebut. Makalah ini ditulis untuk menganalisis model teologi publik untuk konteks kepulauan dan mengaplikasikannya kepada dua konteks: contoh negara kepulauan pasifik, dan konteks kepulauan yang dihadapi oleh Gereja Masehi Injili di Timor dalam provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Apakah kedua contoh yang dibahas di makalah ini sudah memiliki landasan teologi serta model berteologi di ruang publik yang sesuai dengan konteks mereka? Melalui model teologi publik E. Harold Breitenberg Jr. dan Eneida Jacobsen, makalah ini akan menunjukkan model berteologi yang dibangun dalam konteks kepulauan dan bagaimana gereja bisa hadir dalam diskursus publik sebagai suara moral yang mengingatkan perjuangan akan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh penghuni kepulauan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, baik dari konsep teologi publik secara umum, dan menggunakan model teologi publik yang diajukan oleh E. Harold Breitenberg Jr. dan Eneida Jacobsen. Selanjutnya, model teologi publik dari negara kepulauan Pasifik juga akan diberikan sebagai contoh keberagaman isu publik dan teologi kontekstual yang digunakan untuk membahasnya. Kedua model Breitenberg dan Jacobsen akan digunakan sebagai landasan teori untuk melihat dokumen pokok-pokok eklesiologi GMIT dan pengakuan iman GMIT, melakukan analisis atasnya, dan memberi rekomendasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konteks Kepulauan dan Maritim

Secara umum, budaya maritim merujuk kepada interaksi manusia dengan laut dan berbagai kegiatannya di laut. Penelitian ini akan menggunakan definisi yang diajukan oleh Baron, yang menjelaskan,

> Therefore, initially, maritime culture as a component of water culture can be understood as the group or set of features and of material and immaterial cultural expressions such as traditions, beliefs, practices, discourses and customs that are constructed as a result of the continuous, flexible and changing

[3] Kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim berasal dari keinginan untuk menaikkan tingkat penghasilan masyarakat dari berbagai potensi yang dimiliki laut Indonesia. Lihat Poltak Partogi Nainggolan, "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya," *Politica* 6, no. 2 (2015): 172-173. Akibat dari kebijakan ini adalah pembangunan berbagai pelabuhan termasuk pengembangan tol laut dan hidupnya kembali posisi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tidak pernah ada sejak 1955. Beberapa pengamat politik mengritik Presiden Joko Widodo yang sepertinya sudah mengalihkan visi Poros Maritim Dunia dengan pemilihan ibu kota baru yang tidak memiliki akses ke laut. Lihat *Johannes Nugroho,* "Bagaimana Nasib Agenda Poros Maritim Dunia Jokowi?" *Matamata Politik* Website, 28 Oktober 2019, https://www.matamatapolitik.com/bagaimana-nasib-agenda-poros-maritim-dunia-jokowi-opini/ diakses 21 November 2020.

relationship between society and sea/land.[4]

Gambaran mengenai relasi masyarakat dengan tanah dan laut menjadi poin penting dalam kebudayaan masyarakat maritim. Beberapa artikel yang ditulis oleh peneliti Indonesia memberikan definisi budaya maritim dengan karakteristik positif,

> Budaya yang mengedepankan keberanian, kecakapan, keterampilan menghadapi berbagai masalah, budaya yang pandai membaca tanda kehidupan, tanda-tanda zaman, dengan keluhuran budi dan kearifan jiwa dan budaya melayani dan mendahulukan rakyat dan kaum yang lemah baik dalam kondisi yang baik ataupun darurat, dan budaya rela berkorban demi kepentingan umum.[5]

Beberapa karakter yang dituliskan oleh para penulis Indonesia sepertinya lebih memperlihatkan karakter masyarakat daripada definisi mengenai budaya maritim.

Sementara itu, masyarakat pesisir adalah mereka yang tinggal di wilayah peralihan darat dan laut dan menggunakan sumber daya laut dan pesisir sebagai sumber penghasilannya.[6] Masyarakat pesisir umumnya memiliki budaya maritim karena kehidupan mereka tergantung kepada relasi terhadap laut. Selain menjadi nelayan, mata pencarian masyarakat pesisir juga termasuk pengelolaan air laut seperti pertambangan garam, budidaya ikan, transportasi laut, dan penambangan pasir.

Sementara itu, negara kepulauan bisa dipahami sebagai kesatuan tanah/daratan yang terdiri dari pulau-pulau dan dipisahkan oleh air (laut). Masyarakat kepulauan tidak melulu bersandar kepada laut untuk mata pencarian mereka, melainkan bisa menjadi kombinasi petani/peternak (*settler*) dan nelayan, tergantung kepada luas pulau dan tingkat kesuburannya. Darat dilihat sebagai tempat tinggal yang utama, dan laut adalah jalan untuk menuju tempat tinggal yang lain. Negara kepulauan akan menggunakan Angkatan Daratnya sebagai pertahanan utama.

Beberapa ciri masyarakat kepulauan digambarkan oleh Pungetti. Yang pertama adalah isolasi dan ketidaktahuan. Karena isolasi, populasi menjadi bergantung kepada teknologi komunikasi dan transportasi. Biodiversitas juga berkurang dalam proses isolasi dalam pulau. Jarak pulau yang satu dari yang lain juga akan memengaruhi keberagaman dalam pulau. Pungetti juga mengatakan semakin jauh pulau dari pulau utama atau pulau lain, semakin dekat masyarakatnya.[7] Jika sebuah pulau tidak bisa dijangkau dengan mudah, itu berarti penduduk di dalamnya juga sulit untuk keluar dari tempat tersebut. Pulau juga dikenal sebagai tempat di mana sebuah kelompok atau spesies bisa bertumbuh

[4] Aura Tatiana Ome Baron, "Constructing the Notion of the Maritime Cultural Heritage in the Colombian Territory: Tools for the Protection and Conservation of Fresh and Salt Aquatic Surroundings" (New York, 2008), 35.

[5] Kambey, Aling, and Dien, "Eksistensi Budaya Maritim," 138. Mukhlis and Setyadiharja, "Community Development," 41.

[6] Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Bogor; Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3–4.

[7] Gloria Pungetti, "Islands, Culture, Landscape and Seascape," *Journal of Marine and Island Cultures* 1, no. 2 (2012): 52, https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.007.

dengan cara yang berbeda dari tempat yang lain.[8] Mereka yang tinggal di pulau juga memiliki keterikatan yang besar terhadap tempat tinggal mereka, bahkan ketika mereka keluar dari pulau tersebut. Semakin kecil dan terpencil pulaunya, semakin melekat identitas kepulauannya.[9]

Berdasarkan analisis antropologis, struktur masyarakat kepulauan sangat bergantung kepada air segar. Struktur masyarakat dibangun atas distribusi air dan sumber daya. Semakin tinggi tingkat produksi pangan sebuah daerah, solidaritas organiknya akan semakin tinggi. Sementara ketika daerah tidak terlalu subur, mereka akan memiliki solidaritas mekanik.

Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Pembagian Kerja Rendah	Pembagian Kerja Tinggi
Kesadaran Kolektif Kuat	Kesadaran Kolektif Lemah
Hubungan Represif Dominan	Hukum Restitutif Dominan
Konsensus Terhadap Pola-pola normatif itu Penting	Secara Relatif Saling Ketergantungan itu Tinggi
Secara Relatif Saling Ketergantungan itu Rendah	Secara Relatif Saling Ketergantungan itu Tinggi
Bersifat Primitif atau Perdesaan	Bersifat Industrial Perkotaan

Sumber: Johnson (1986)

Di daerah pulau Samosir misalnya, karena daerahnya subur namun tidak menghasilkan kelimpahan makanan, mereka tidak membutuhkan hierarki kuat untuk mengatur sumber daya. Di pulau Jawa, karena daerah subur, mereka memiliki surplus makanan yang memerlukan pengaturan sumber daya dan pembagian kerja. Akhirnya struktur Hindu yang cocok dengan masyarakat Jawa membuat hierarki muncul sebagai penanganan manajemen pangan.[10] Di pulau-pulau yang tidak terlalu subur, masyarakat yang beternak memerlukan tanah untuk mengelola ternak. Akhirnya hierarki muncul berdasarkan teretorik untuk mempertahankan atau merebut air dan sumber daya. Kelompok juga biasanya lebih kecil dan bahasa lebih beragam karena keterpisahan pulau dan sumber daya.

Kekuatan dari masyarakat kepulauan adalah kemandiriannya. Mereka memiliki identitas yang cukup khas, sehingga ketika mereka keluar dari pulau mereka cenderung lebih dekat dibandingkan ketika berada dalam pulau. Karakter yang penduduk pulau miliki adalah keras, tegas dan terbuka serta cukup kompetitif terutama dalam perebutan sumber daya alam. Karena bergantung kepada alam, masyarakat kepulauan sangat menghormati tanah di mana mereka tinggal. Mereka akan berusaha menjaga keselarasan dengan alam melalui berbagai ritus.

Menurut Watloly salah satu ciri masyarakat kepulauan juga adalah kesadaran sosial yang membuat mereka memiliki "seni vokal, seni tari, seni rupa, ukir, tenun, batik, arsitektur, adar perkawinan, dan lain-lain."[11] Mereka juga akan memiliki kekayaan dalam bahasa, rumah adat, dan warna pakaian.

8 Pungetti, 53.

9 Oliver Rackham, "Island Landscapes: Some Preliminary Questions," *Journal of Marine and Island Cultures* 1, no. 2 (2012): 88–89, https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.001.

10 Sulistiyono and Rochwulaningsih, "Contest for Hegemony: The Dynamics of Inland and Maritime Cultures Relations in the History of Java Island, Indonesia," 116.

11 Aholiab Watloly, "Konsep Diri Masyarakat Kepulauan," *Filsafat* 22, no. 2 (2012): 134.

Watloly juga mencatat ada tiga pilar masyarakat kepulauan, yaitu

> …kumpulan bahan tradisi adat masing-masing masyarakat kepulauan *(corpus)*; suasana atau keadaan lingkungan masyarakat kepulauan *(context);* dan isi pikiran, muatan atau kandungan nilai keutamaan yang menjadi inti *(content)* hidup yang diwarisi masing-masing masyarakat kepulauan, baik dalam bentuk tradisi seni, puisi, mantra-mantra, cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain sebagainya.[12]

Kemajuan teknologi informasi kemungkinan membawa keterkejutan budaya bagi masyarakat pulau. Ketika investor masuk ke pulau, kemungkinan besar tanah yang akan dikembangkan ada di daerah pantai karena lebih menjanjikan. Akibatnya, kemajuan akan dilihat sebagai perusak keseimbangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir. Pada akibatnya mereka akan memiliki konflik dan masyarakat lokal akan dipaksa untuk berubah mengikuti teknologi terbaru.

Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pesisir juga dihadapi oleh masyarakat kepulauan. Masyarakat kepulauan juga dihadapkan pada permasalahan globalisasi dan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang membuka berbagai tantangan baru. Tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat yang hidup dikelilingi air, terutama di Kawasan Asia dan Pasifik secara umum adalah konservasi laut[13] yang muncul karena pemanasan global.[14] Isu lainnya adalah pendidikan, kesehatan, kemajuan teknologi, dan juga

3.2 Teologi Publik dan Isu Publik

Teologi publik adalah tema teologis yang lahir dari pemisahan gereja dan negara. Gereja dan iman dianggap berada dalam lingkup privat, sementara tema mengenai kehidupan bersama dalam polis diatur dalam ruang publik. Sebenarnya pemisahan tajam agama dan negara tidak sepenuhnya terjadi di Indonesia maupun di kebanyakan negara di Asia. Agama selalu memainkan peran publik di sebagian besar negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Publik berasal dari kata *publicus* (Lat.), "dari negara; dilakukan demi atau atas biaya negara; atas perintah (nama) negara; umum."[15] Dalam masyarakat Romawi, *publicus* berarti milik rakyat dan sesuai dengan rakyat (umum).[16] Tempat publik bertemu dan bertukar pikiran disebut *public sphere* (Inggris), atau Ö*ffentlichkeit* (Jerman). Ruang publik bersifat otonom dan

---

12 Watloly, "Konsep Diri Masyarakat Kepulauan," 136.

13 Sun Kee Hong, "Biocultural Diversity Conservation for Island and Islanders: Necessity, Goal and Activity," *Journal of Marine and Island Cultures* 2, no. 2 (2013): 102–6, https://doi.org/10.1016/j.imic.2013.11.004.

14 Walter Leal Filho, ed., *Climate Change in the Asia-Pacific Region*, Climate Change Management (Cham, Switzerland: Springer, 2015), https://doi.org/10.1007/978-3-319-14938-7.draughts, heat waves, tropical cyclones, intense rainfall, tornadoes, thunderstorms, etc. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, "Addressing Climate Change Education for Sustainable Development," *Experts Meeting on Climate Change: Education for Sustainable Development in Asia and Pacific* (Manila: Unesco, 2014), https://en.unesco.org/events/experts-meeting-climate-change-education-sustainable- development-asia-and-pacific, accessed October 11th 2020.

15 *Kamus Latin – Indonesia*, s.v. "publicus". P*ublicus* adalah lawan kata *privatus* (privat).

16 F. Budi Hardiman, ed., *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" Dari Polis Sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 3.

egaliter di mana masyarakat sipil (bukan militer) bisa berbicara mengenai masalah yang mereka anggap penting. Di masa ini, ruang publik juga bisa meliputi dunia sosial media dan forum internet.

Konsep teologi publik pertama kali disebut oleh Martin Marty dengan pemahaman teologi publik sebagai cara seseorang mengekspresikan iman di tengah komunitasnya.[17] Ketika seseorang berbicara di ruang publik, dia melandaskan pendapatnya kepada pemahaman teologisnya mengenai isu tersebut. Elaine Graham menyebutkan ketika teologi muncul di ruang publik, dia tidak dianggap sebagai sumber kebenaran melainkan sebuah pendapat lain yang ingin berkontribusi.[18] Sedangkan bagi Graham, teologi publik adalah pembahasan teologis dari sebuah tradisi iman tertentu yang bisa juga dinikmati oleh komunitas iman lainnya.

Jürgen Moltmann mendefinisikan teologi publik sebagai tindakan menyuarakan suara kenabian yang berasal dari Kerajaan Allah di publik sehingga mau tidak mau teologi akan selalu bersifat publik. Moltmann mengatakan, "As the theology of God's kingdom, theology has to be *public* theology: public, critical and prophetic complaint to God – public, critical and prophetic hope in God."[19]

Menurut Sebastian Kim, teologi publik kontribusi komunitas agama tertentu ke dalam percakapan publik mengenai tema dalam masyarakat.[20] Teologi publik bisa juga dipahami sebagai interaksi komunitas agama dengan masyarakat dalam percakapan mengenai hajat hidup orang banyak dengan menggunakan bahasa yang dialogis dan dapat dipahami.[21] Kontribusi komunitas agama didasarkan kepada kebenaran yang mereka pahami berasal dari perintah Yang Ilahi. Namun demikian, ketika teologi muncul di ruang publik, dia harus memiliki kerendahan hati untuk menerima kritik karena ruang publik adalah ruang yang terbuka. Teologi bisa saja memberi panduan, kritik, saran, dan rambu-rambu kepada masyarakat dalam bahasa yang publik juga pahami, namun dia juga harus siap untuk ditolak jika dianggap tidak sesuai dengan konsensus publik. Menurut Kim, ada enam ruang publik, yaitu: 1) negara; 2) media; 3) komunitas agama; 4) akademis; 5) masyarakat sipil; dan, 6) pasar.[22]

Tujuan dari teologi publik adalah untuk mencapai "*common good*" terutama dalam bidang keadilan dan kesejahteraan.[23]

---

17 E. Harold Breitenberg Jr., "What Is Public Theology?," in *Public Theology for a Global Society: Essays in Honor of Max Stackhouse*, ed. Deirdre King Hainsworth and Scott R. Paeth (Grand Rapids, Michigan; Cambridge, UK: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2010), 7.

18 Elaine Graham, *Between A Rock and A Hard Place: Public Theology in A Post-Secular Age* (London: SCM Press, 2013), xvi.

19 Jürgen Moltmann, *God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology*, trans. Margaret Kohl (London: SCM Press, 1999), 5.

20 Sebastian Kim, *Theology in the Public Sphere: Public Theology as a Catalyst for Open Debate* (Norwich: Hymns Ancient & Modern Ltd., 2011), 3–4. E. Harold Breitenberg, "To Tell the Truth: Will the Real Public Theology Please Stand Up," *Journal of the Society of Christian Ethics* 23, no. 2 (2003): 58, https://doi.org/10.5840/jsce20032325.

21 Sebastian Kim, "Public Theology in the History of Christianity," in A Companion to Public Theology, ed. Sebastian Kim and Katie Day (Leiden; New York: Brill, 2017), 41–43, https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004336063_004. Breitenberg, "To Tell the Truth: Will the Real Public Theology Please Stand Up," 66.

22 Kim, *Theology in the Public Sphere,* 13.

23 Len Hansen, *Christian in Public: Aims, Methodologies and Issues in Public Theology* (Cape Town: Sun Press, 2007), 56.

Mencapai kebaikan bersama tidak berarti untuk mengkristenkan yang lain, melainkan mencari apa yang Allah inginkan bagi seluruh ciptaan. Pelaku teologi publik juga bisa dibedakan menjadi 3. Pertama, teolog yang aktif bersuara di publik. Teolog yang aktif di ruang publik bisa mengatasnamakan gereja dan diutus resmi oleh gereja, atau mereka yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi publik. Kedua, orang-orang Kristen yang dipersiapkan oleh gereja untuk terjun di ruang publik. Warga gereja perlu dipersiapkan dengan pengajaran mengenai dasar teologis dan posisi gereja mengenai isu tertentu dan meminta mereka untuk aktif terlibat dalam percakapan publik. Ketiga, gereja sebagai institusi terlibat langsung dalam isu yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam poin ketiga ini, beberapa gereja memiliki keberatannya sendiri karena menganggap keterlibatan dalam isu kemasyarakatan bukanlah tugas mereka.

Melalui teologi publik, umat beragama akan membangun sebuah konstruksi komunikatif dengan yang lain untuk menghasilkan kebaikan bersama. Pada akhirnya, tujuan dari keterlibatan teologi di ruang publik adalah untuk memberitakan keadilan dan kedamaian yang merupakan perwujudan dari kedatangan kerajaan Allah.[24] Teologi publik menjadi lebih luas dari teologi politik, karena berbagai disiplin ilmu lain juga bisa dibicarakan olehnya seperti ekonomi, hukum, budaya, sosial, dalam konteks lokalnya.

Di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia* (DKG-PGI) 2019-2024 menyatakan bahwa gereja ada di tengah-tengah dunia ini sebagai arak-arakan umat Allah, yang terus bergerak menuju ke kepenuhan hidup di dalam Kerajaan Allah.[25] Dalam relasinya dengan pemerintah PGI melihat,

> Gereja dipanggil untuk membina hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan semua pihak di dalam masyarakat untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua orang, dalam rangka mewujudkan dan mendirikan tanda-tanda Kerajaan Allah menuju kesempurnaannya di dalam Yesus Kristus.[26]

Gereja dipanggil untuk hadir dalam ruang publik dalam rangka mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam hal penegakan keadilan, kesejahteraan seluruh rakyat dan keutuhan ciptaan

Landasan keterlibatan gereja di ruang publik dalam Dokumen PGI adalah panggilan sosial-ekologis gereja yang merupakan tanggung jawab moral-etis warga gereja yang juga sebagai warga negara. Beberapa prinsip teologis "Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB

Sebastian Kim and Katie Day, "Introduction" in *A Companion to Public Theology*, Brill's Companions to Modern Theology, eds. Sebastian Kim and Katie Day (Leiden: Brill, 2017), 11, https://doi.org/10.1163/9789004336063_013.

[24] Miroslav Volf, *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good* (Grand Rapids, Michigan: Brazos Press, 2011).

[25] Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, "Pemahaman Bersama Iman Kristen," dalam *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2014-2019*, 1st ed. (Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2010), pasal 19.

[26] Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, "Pemahaman Bersama Iman Kristen," pasal 18.

PGI)" mengenai panggilan sosial-ekologis gereja yang berkenaan dengan peran gereja di masyarakat di antaranya:

> "… (2) … menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah yakni keadilan perdamaian, damai sejahtera dan keutuhan ciptaan dalam masyarakat di mana gereja hadir; (4) … tanggung jawab moral-etis warga gereja sebagai warga negara memperjuangkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Dalam hal ini gereja-gereja berpartisipasi secara positif, kritis, kreatif, dan realistis, dengan tetap berpengharapan dan transformatif dalam pembangunan, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan semua umat beragama dan berkepercayaan."[27]

"Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI)" memberikan gambaran tugas yang cukup komplet bagi gereja untuk terlibat dalam panggilannya menghadirkan tanda Kerajaan Allah. Tugas gereja dilakukan dengan empat kata: secara "positif" menjadi peserta dalam pembangunan bangsa; "kritis" dan tidak sekadar mendukung; "kreatif" dalam melihat peluang pelayanan di area yang diperlukan; dan "realistis" bukan bicara mengenai perwujudan yang utopis. Dalam relasinya dengan pemerintah untuk menjalankan tugas, dokumen PPTB-PGI mencatat, "5. … gereja taat kepada pemerintah sesuai hukum yang berlaku dan menjadi mitra dalam panggilan sosial-ekologis; namun jika pemerintah tidak menjalankan kekuasaan sebagaimana mestinya maka gereja mengutamakan ketaatan kepada kehendak Allah."[28] Prinsip ketaatan lebih utama kepada kehendak Allah menekankan kembali peran mitra yang kritis. PGI mendorong gereja-gereja untuk memperlihatkan wujud nyata panggilan keterlibatan gereja di ruang publik dalam aksi nyata.[29] Dari pemaparan di atas muncul pertanyaan, teologi publik apa yang sesuai dengan konteks masyarakat kepulauan sebagai tanggung jawab gereja, terutama di lingkungan Gereja Masehi Injili di Timor.

3.3 Model Teologi Publik

Ada beberapa teolog yang sudah menuliskan klasifikasinya mengenai tipe teologi publik.[30] Karena ragam konteks, tidak ada bentuk tunggal dari teologi publik; mereka memiliki model dan pelaku yang berbeda. Namun demikian, kita akan melihat dua pembagian besar oleh E. Harold Breitenberg Jr. dan Eneida Jacobsen.

Breitenberg adalah dosen *religious studies* di Randolph-Macon College. memiliki latar belakang gereja Presbyterian di Amerika

[27] Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, "Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI) 2019–2024,"dalam *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2014-2019*, 1st ed. (Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2010) pasal 48.

[28] Ibid.

[29] Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, "Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI) 2019–2024," pasal 9.

[30] Breitenberg Jr., "What Is Public Theology?"; Eneida Jacobsen, "Models of Public Theology," *International Journal of Public Theology* 6, no. 1 (2012): 7–22, https://doi.org/10.1163/156973212x617154. Darren Cronshaw, "Exploring Local Church Praxis of Public Theology," *International Journal of Public Theology* 14, no. 1 (2020): 68–96, https://doi.org/10.1163/15697320-12341601; Hetty Lalleman-de Winkel, "The Old Testament Contribution to Evangelical Models for Public Theology," *European Journal of Theology* 14, no. 2 (2005): 87–97; Andrew T. B. McGowan, "Church and State: The Contribution of Church History to Evangelical Models for Public Theology," *European Journal of Theology* 14, no. 1 (2005): 5–16.

Serikat. Dia mengungkapkan bahwa literatur teologi publik bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah kategori para teolog, pejabat gereja, atau tokoh lain sebagai teolog publik sehingga karya mereka disebut sebagai teologi publik. Breitenberg mengritik model ini karena teologi publik terkesan lebih mengena kepada individu dari sebuah kebijakan kolektif dari kekristenan. Kedua, adalah diskusi mengenai apa itu teologi publik. Dan tipe ketiga adalah jenis literatur yang membangun dan memberi petunjuk bagi gereja dan orang-orang di luar gereja mengenai isu terkini berdasarkan tradisi panjang kekristenan dan komunitas. Dari pemahaman Breitenberg, penelitian ini menyimpulkan bahwa teologi publik harus menjadi usaha bersama dari komunitas dan bukan hanya sekadar ide perorangan yang kemudian diberi nama teologi publik.[31] Usaha bersama bisa dilakukan oleh individu, namun yang dilakukannya akan mewakili komunitas dan terbuka untuk kritik dan evaluasi dari publik. Teologi yang dibangun juga tidak boleh menafikan berbagai sumber di luar tradisi kekristenan, baik dari sumber maupun bahasa yang digunakan.

Jacobsen adalah dosen di Villanova University, Pennsylvania yang menyelesaikan studi teologi sistematika dan mengajar di departemen filsafat. Berdasarkan landasan teorinya dan bagaimana dia diterapkan dalam masyarakat, Jacobsen menggambarkan dua jenis besar model teologi publik: (1) landasan teori dan (2) siapa pendengarnya. Model teologi publik berdasarkan landasan teorinya dibagi menjadi tiga. Pertama, model *disclosure* yaitu teologi publik yang dibangun di atas argumen teologis yang secara terbuka disampaikan. Model ini berusaha terlibat dalam percakapan publik dengan menggunakan teologi dan bahasa teologis di ruang publik, tanpa ada yang disembunyikan. Kedua, model *universal* yaitu keterlibatan publik dengan menggunakan bahasa yang lebih umum dan bisa diterima oleh konteks tertentu. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan konten yang bisa diterima oleh publik namun tetap berlandaskan pesan kekristenan. Yang terakhir adalah model *factual* yaitu teologi publik yang dikerjakan tanpa perlu memproklamirkan bahwa dia membawa pesan kekristenan. Menurut Jacobsen, model terakhir tidak menunjukkan diri *per se,* tetapi, "The publicity of theology is not a task to be pursued: it, through the action of diverse religions and their faiths, is inevitably made public, in the sense of achieving visibility (the model of disclosure) and/or scope beyond the particular (the universal model)."[32]

Model teologi publik berdasarkan cara menjawab isu yang sedang dibahas di ruang publik dibagi juga menjadi 3. Pertama, model yang bicara kepada pendengar yang spesifik *(audience model)*. Yang kedua adalah model apologetik (*apologetic model)* yang membela

[31] Charles Lattimore Howard, *Black Theology as Mass Movement* (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 119-120. Howard setuju dengan pendapat Breitenberg yang tidak mendorong teologi publik sebagai suara bersama dan bukan hanya teolog atau tokoh tertentu.

[32] Jacobsen, "Models of Public Theology," 12.

tradisi meski dengan bahasa yang lebih bisa dipahami publik. Dan terakhir adalah model kontekstual (*contextual model*) yang mengambil pengalaman dan pergumulan gereja lokal. Bahasa yang digunakan oleh model terakhir bisa mengintegrasikan etika sosial dan ekklesiologi yang menggerakkan gereja untuk bersikap.[33]

3.4 Teologi Kelapa sebagai Teologi Publik dari Kepulauan Pasifik

Tugas utama dari teologi publik adalah untuk terlibat dalam percakapan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan bagi publik. Dalam konteks kepulauan, teologi sepertinya akan selalu berbicara mengenai perdamaian dan kesatuan antarkelompok, kesejahteraan dalam pemerataan akses ke pendidikan dan kesehatan, semakin memburuknya pemanasan global yang menyebabkan banyak garis pantai akan berpindah semakin ke dalam pulau, juga globalisasi akibat teknologi informasi dan komunikasi. Bagi daerah kepulauan, laut dan tanah adalah kehidupan. Ketika salah satu dari unsur ini terganggu, seluruh pulau akan terganggu. Teologi publik bagi daerah kepulauan harus selalu menjaga keseimbangan kemajuan dan tradisi.

Satu contoh dari teologi kepulauan adalah dari Pasifik. Mereka mencatat tiga masalah utama. Pertama adalah integrasi dan konflik – relasi dengan pemerintah pusat. Sampai saat ini mereka masih menghadapi berbagai kudeta yang menghasilkan operasi militer seperti di Fiji. Tomlinson mencatat perebutan sumber daya alam bisa menghasilkan konflik berkepanjangan bagi mereka.

Masalah kedua yang harus dihadapi adalah isu ekologi dan krisis lingkungan hidup. Persoalan naiknya permukaan laut, menghilangnya ekosistem laut, dan perubahan iklim adalah ancaman bagi mereka yang tinggal di kepulauan. Ketiga, respons terhadap globalisasi. Setelah sekian lama berdiri sendiri, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bisa membuat masyarakat lokal terkejut dan tidak siap menghadapi perubahan.[34]

Salah satu contoh teologi yang muncul dari daerah kepulauan adalah dari daerah Pasifik dengan teologi kelapa mereka. Kelapa bisa ditemui juga dengan mudah di berbagai kepulauan di Indonesia. Havea, seperti dikutip oleh Tomlinson menjelaskan teorinya sebagai berikut,

> Once it bears fruit it continues to bear fruit every year. . . . When the coconut rolls down it rolls down with its many lifegiving possibilities… Bread and wine are foreign and very expensive to import. The wheat and the grapes are two separate elements. The coconut has both the drink and the food from the same fruit, like the blood and flesh from the one and the same body of Christ . . . If Jesus had grown up and lived in the Pacific, He could have added another identification of himself—I am the Coconut of Life.[35]

[33] Ibid, 19.

[34] Matt Tomlinson, *God Is Samoan: Dialogues between Culture and Theology in the Pacific* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2020), 7. Tomlinson sendiri adalah seorang antropolog dan bukan teolog.

[35] Sione 'Amanaki Havea, "Christianity in the Pacific Context,"

Dengan kelapa, mereka membuka keramahan terhadap yang lain, dan dalam keramahan ada kesempatan untuk berdialog. Kekuatan teologi kepulauan ada pada keramahannya kepada yang asing. Air kelapa juga digunakan dalam Perjamuan Kudus sebagai kontekstualisasi air kelapa sebagai pemberi kehidupan. Kelapa dipahami sebagai perayaan kehidupan karena Havea percaya bahwa kehidupan di Pasifik berdasar kepada kerjasama dalam masyarakat, keterlibatan intergenerasi dan keluarga besar, serta menghargai dan merawat orangtua.

Selain kelapa sebagai tanda kehidupan, Tomlinson juga menjelaskan tiga simbol yang menggambarkan tema utama para teolog di Pasifik. Yang pertama adalah *talanoa* yang menggambarkan dialog, sebuah percakapan, ciri utama masyarakat Pasifik. Dialog adalah cara masyarakat untuk berinteraksi, menyelesaikan masalah, menyangkut berbagai aspek dalam hidup. *Talanoa* membutuhkan partisipasi dua pihak, yang berbicara dan yang mendengarkan. Kedua, *mana,* yaitu kuasa spiritual seseorang atau sebuah benda, yang diakui oleh mereka yang melihatnya.[36] Kuasa spiritual muncul dalam diri seorang kepala suku atau bahkan dalam kedamaian dari tanah Pasifik. Dalam pemaknaan teologis, Sevati Tuwere mengungkapkan bahwa *mana* adalah berkat dan kuasa yang datang dari kerendahhatian dan kerelaan Kristus memberikan diri-Nya. Kristus adalah *mana* yang memberi kehidupan dan kebebasan.[37] Simbol ketiga adalah *kava* sebuah minuman tradisional dari akar dan batang tanaman *piper methysticum* yang mengandung unsur psikoaktif. Kava dinikmati dalam percakapan *talanoa* dan dihubungkan dengan kekuatan *mana*. Kava juga pernah digunakan dalam praktik perjamuan kudus di Pacific Theological College.

Ketiga simbol di atas mengambil unsur lokal kehidupan sehari-hari masyarakat Pasifik sebagai teologi kontekstual mereka. Seperti halnya perjumpaan Injil dan budaya di tempat lain, tidak semua gereja di Pasifik bisa mengadopsi unsur lokal ke dalam gereja. *Mana* dianggap dapat membawa kekuatan gelap, dan *kava* memiliki aura spiritual karena pernah diasosikan dengan ritus tradisional.[38] Para teolog Pasifik masih terus berupaya melahirkan teologi kontekstual yang akan menjadi dasar mereka untuk berteologi di ruang publik.

Meski demikian, seperti sifat teologi publik yang bicara mengenai *common good,* tema teologi publik yang diangkat dari negara-negara Pasifik juga mengangkat isu yang relevan. Beberapa tulisan yang pernah diangkat adalah kekerasan domestik di Samoa,[39] orientasi konseling pastoral yang

in *South Pacific Theology: Papers from the Consultation on Pacific Theology Papua New Guinea, January 1986*, ed. John D'Arcy (Oxford: Regnum Books International, 1987), 14–15.

36 Tomlinson, *God Is Samoan: Dialogues between Culture and Theology in the Pacific*, 69–71.

37 Ilaitia Sevati Tuwere, *Vanua: Towards a Fijian Theology of Place* (Suva; Auckland: Institute of Pacific Studies at the University of the South Pacific & College of St. John the Evangelist, 2002), 158.

38 Tomlinson, *God Is Samoan: Dialogues between Culture and Theology in the Pacific*, 74.

39 Mercy Ah Siu Maliko, "Constructing a Samoan Public Theology of Values" (Ph.D. dissertation, University of Otago, 2015). Mercy Ah Siu-Maliko, *Embodying Aga Tausili: A Public*

sadar akan perbedaan budaya,[40] kekerasan terhadap mereka yang berada dalam posisi minoritas.[41] Satu hal yang khusus juga dari beberapa tema teologi publik dari Asia, Pasifik, Afrika, dan Amerika Selatan (*global South*), menggunakan pendekatan poskolonial dan kontekstual.[42]

3.5 Membangun Sebuah Teologi Publik Masyarakat Kepulauan di Indonesia

Mengingat luasnya negara Indonesia, dan memahami tantangan yang dihadapi oleh gereja dalam konteks kepulauan, penelitian ini mengambil Gereja Masehi Injili di Timor sebagai contoh gereja yang teologi publiknya akan dibahas secara mendalam. Meski demikian masih banyak sinode gereja di Indonesia yang masuk ke dalam definisi kepulauan dan perhatian utama warga akan isu-isu kontekstual yang mereka hadapi, misalnya Gereja Protestan Maluku (GPM) yang daerah pelayanannya adalah provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan Banua Hiho Keriso Protestan (BNKP) yang berasal dari kepulauan Nias. Pembatasan penelitian tentu tidak menutup gereja-gereja lain yang masuk ke dalam definisi konteks kepulauan seperti yang sudah dinyatakan di atas.

Penelitian ini akan memaparkan tiga hal yang juga bisa digunakan sebagai model untuk menganalisis teologi publik sebuah gereja. Pertama, profil sinode gereja secara singkat, dan mengapa GMIT masuk ke dalam konteks kepulauan berdasarkan penjelasan karakteristik masyarakatnya.

Kedua, berteologi di ruang publik juga berarti mengetahui apa isu sosial yang sedang menjadi perhatian utama masyarakat kepulauan (isu publik) tempat mereka berada (*common good*). Untuk mengetahui isu publik, penelitian ini akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik provinsi di mana ketiga sinode tersebut berada dan data dari organisasi LOCALISE (Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment) SDGs (Sustainable Development Goals) di Indonesia:

> LOCALISE SDGs didukung oleh bantuan hibah dari Uni Eropa, dan dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan melibatkan asosiasi pemerintah daerah dan DPRD, seperti APPSI, APKASI, ADEKSI, dan ADKASI. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan asosiasinya dalam melaksanakan TPB di 16 provinsi dan 14 kota di Indonesia, sekaligus berjejaring dengan pemerintah daerah di dalam maupun luar negeri dan aktor pembangunan lainnya.[43]

Program ini mencatat perkembangan

Theology from Oceania (Lanham, Maryland: Lexington Books/ Fortress Academic, 2021).

40 Lydia Johnson, *Drinking From The Same Well: Cross-Cultural Concerns in Pastoral Care and Counseling* (Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2011).

41 James Haire, "Public Theology, A Latin Captivity of the Church: Violence and Public Theology in the Asia-Pacific Context," *International Journal of Public Theology* 1, no. 3&4 (2007): 455–70, https://doi.org/https://doi.org/10.1163/156973207X231725.

42 Mark G. Brett and Jione Havea, eds., *Colonial Contexts and Postcolonial Theologies: Storyweaving in the Asia-Pacific* (New York: Palgrave Macmillan, 2014), https://doi.org/10.1057/9781137475473.

43 LOCALISE SDGs UCLG ASPAC-APEKSI, "Tentang Kami - Localise SDGs Indonesia," 2020, https://localisesdgs-indonesia.org/tentang-kami, diakses 20 Januari 2021.

pengembangan *Sustainable Development Goals* (*SDGs* – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) sebagai indikator pembangunan pemerintah daerah dan kesejahteraan rakyat.[44] Indikator yang digunakan mencakup faktor pendidikan, kependudukan, kesehatan, dsb. LOCALISE SDGs menampilkan profil daerah, peluang investasi daerah, prioritas daerah, dan status pelaksanaan TPB. Dengan menampilkan prioritas pembangunan pemerintah daerah, penelitian ini menunjukkan apa yang menjadi tujuan bersama dari program pembangunan di sebuah daerah.

Ketiga, penelitian ini juga akan mengacu kepada model berteologi secara komunal yang telah dibahas sebelumnya, dan landasan berteologi di ruang publik bagi sinode GMIT berdasarkan dokumen pengakuan iman mereka. Dokumen pengakuan iman adalah pernyataan formal yang dibuat oleh gereja, yang menjadi ciri gereja Protestan yang berciri konfesional, mengenai apa yang mereka percaya dan bahkan diberi status dalam level pengakuan doktrinal.[45] Pengakuan iman berasal dari kata *confession* dan memperlihatkan kesepakatan kelompok dan persetujuan orang yang ada di dalamnya mengenai reaksi atas karya keselamatan Allah.[46] Pemaparan Breitenberg dan Jacobsen mengenai model teologi publik secara komunal menemukan landasannya dalam dokumen pengakuan iman. Karena posisi penting dokumen pengakuan iman, dia akan digunakan sebagai landasan teologis gereja untuk ikut bersuara dalam ruang publik mereka, yaitu masyarakat di mana mereka berada.

3.6 Teologi Publik Gereja Masehi Injili di Timor

Pertama, Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang berkantor pusat di kota Kupang. GMIT melayani jemaat dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari kemandirian dari Indische Kerk untuk daerah Timor dan pulau-pulau sekitarnya.[47] GMIT adalah hasil penginjilan Nederlandsche Zendeling Genootschap (NZG) dari Belanda dengan tradisi Hervormd, Calvinis. Dalam laporan di Sidang Raya XVII PGI 2019, GMIT memiliki 1.050.413 anggota.[48] Tema utama yang muncul dari para teolog lingkungan GMIT adalah kemiskinan, perdagangan manusia, ekoteologi terutama berhubungan dengan

[44] SDGs adalah program yang dicetuskan PBB pada 2015 untuk mencapai 17 tujuan yang saling berhubungan pada 2030. Program ini kemudian diratifikasi oleh hampir semua negara anggota PBB untuk menjadi program global. Contoh lima program pertama dari 17 adalah: menghapus kemiskinan ekstrem, menghapus kelaparan, mencapai hidup yang sehat dan mental yang kuat, pendidikan yang berkualitas, dan kesetaraan gender.

[45] Alan Cairns, *Dictionary of Theological Terms* (Belfast; Greenville: Ambassador Emerald International, 2003), s.v. "confession of faith".

[46] Werner Klän, "Aspects of Lutheran Identity: A Confessional Perspective," *Concordia Journal* 32, no. 2 (2006): 133–34. PC(USA) Advisory Council on Discipleship and Worship, "The Confessional Nature of the Church," *The Journal of Presbyterian History* 79, no. 1 (January 2001): 87–102.

[47] Frank L. Cooley, *Benih Yang Tumbuh XI: Gereja Masehi Injili di Timor* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 1976).

[48] Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, *Buku Panduan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia* (Waikabul, Sumba Tengah: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2019), 45. Jumlah penduduk provinsi Nusa Tenggara Timor per 2020 adalah 5,33 juta dengan 52,45% (2,795 juta) adalah penganut Katolik, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020* (Kupang: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020), 26. Anggota GMIT tidak hanya berada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

tema laut sebagai tempat Allah memberi kehidupan, gizi rakyat, moralitas sehari-hari (terkait alkohol, seks bebas, judi, dsb.).

Tiga sektor pekerjaan utama masyarakat NTT pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan (51,43%), perdagangan (11,02%), industri pengolahan (9,5%), jasa pendidikan dan kesehatan (7,86%).[49] Dalam rinciannya, sektor perkebunan dan peternakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan memberi pemasukan kepada daerah. Jumlah rumah tangga yang bekerja dalam sektor perikanan adalah 32.212 rumah tangga, dengan penghasil terbesar dari kabupaten Sumba.[50] Badan Pusat Statistik Provinsi NTT mencatat, "Melihat kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan perikanan belum banyak diminati oleh masyarakat. Sementara itu permintaan terhadap hasil perikanan diperkirakan terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya volume ekspor hasil perikanan."[51] Dengan demikian, provinsi NTT adalah masyarakat kepulauan karena mata pencarian utama tidak berasal dari relasi dengan laut.

Berdasarkan dokumen TPB, provinsi Nusa Tenggara Timur sedang fokus kepada visi perwujudan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan adil dengan cara industri pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan untuk kualitas SDM, dan reformasi pemerintahan. Secara khusus, TPB provinsi bicara mengenai isu kemiskinan karena angka kemiskinan adalah 20,9% di atas angka rata-rata nasional Indonesia yaitu 9,78%.[52] Pengembangan infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, terutama memberi penekanan kepada pembangunan akses air bersih, sanitasi, mengurangi angka buta huruf, dan peningkatan kesehatan bayi (kampanye ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan).[53]

"Pokok-pokok Eklesiologi GMIT" memberi beberapa pokok perhatian yang menjadi bagian dari GMIT untuk hadir di dunia dengan Allah sebagai pemilik misi. GMIT menunjukkan kesadaran akan pentingnya keberpihakan kepada kaum yang lemah dan terpinggirkan dan menyatakan, "GMIT harus bersikap kritis terhadap segala bentuk kekuasaan yang eksploitatif di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya."[54] Lebih lanjut GMIT juga mencantumkan beberapa isu penting bagi konteksnya, yaitu "ketidakadilan, penindasan, diskriminasi,

[49] BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Statistik Sosial*, 26.

[50] BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Indikator Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020* (Kupang: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020), 63-64.causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

[51] Ibid, 64.causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

[52] BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Statistik Sosial Dan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020*, 68. 70. Garis kemiskinan provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2020 adalah Rp. 403.005 per kapita per bulan.

[53] LOCALISE SDGs, "Provinsi Nusa Tenggara Timur - LOCALISE SDGs Indonesia," 2020, https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17, diakses 20 Januari 2022.

[54] Gereja Masehi Injili di Timor, "Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT" (Kupang, 2015), Bagian B Misi GMIT, pasal 6.

eksploitasi (manusia dan alam), dan pelanggaran HAM" ("Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT," Bagian B Misi GMIT, pasal 7b). Beberapa poin kontekstual secara khusus dipaparkan dalam dokumen tersebut yaitu: kemiskinan (pasal 12);[55] pendidikan (pasal 13); ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 14), kesehatan (pasal 15), relasi laki-laki dan perempuan (pasal 16), dan lingkungan hidup (pasal 17). Pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk "… sebuah perjuangan untuk menentang sistem yang tidak adil (diakonia transformatif), memberi penyadaran akan hak- hak orang miskin, serta memperjuangkan hak- hak yang telah terampas (diakonia reformatif)" ("Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT," Bagian B Misi GMIT, pasal 7c). Lebih lanjut, dalam poin relasi gereja dan negara, dokumen ini bahkan menyatakan bahwa gereja adalah mitra kritis, bahkan,

> "Jika semua jalur hukum dan politis telah diupayakan namun tidak berhasil maka gereja baik secara lembaga maupun perorangan dapat mengambil tindakan penolakan dan perlawanan damai/pembangkangan sipil (civil disobedience). Selain itu gereja merupakan agen keadilan Allah di dunia. Untuk itu GMIT memiliki tugas untuk mengupayakan keadilan."[56]

Pengakuan yang tegas ini menunjukkan GMIT bisa ikut aktif dalam diskursus ruang publik dengan menyampaikan teologi yang kuat sebagai dasar kehidupan bersama.

Landasan pengakuan iman yang kuat mendorong GMIT terlibat dalam berbagai isu publik. Tema utama yang tercantum dalam dokumen GMIT, yang juga sejalan dengan program pemerintah provinsi adalah melawan kemiskinan. Gereja memiliki dasar kuat untuk sepenuhnya turut serta dalam pembangunan *common good*, dan berteologi di ruang publik di konteks kepulauannya.

Ada dua hal yang menjadi catatan khusus dalam membangun teologi publik GMIT. Pertama, bahwa GMIT dan pemerintah provinsi NTT memberi perhatian yang sama akan masalah kemiskinan. Dalam "Pokok-pokok Eklesiologi GMIT" Bagian B Misi GMIT pasal 12, GMIT menunjukkan model *disclosure* (pernyataan dalam model teologi publik Jacobsen, tetapi pada saat yang sama juga memperlihatkan karya nyata dalam model *factual*. GMIT mengajukan pemikiran teologi solidaritas untuk saling menguatkan dan menopang sebagai jalan menolak ketidakadilan dan politik ekonomi yang menindas. Bukan hanya dalam ide, GMIT juga didorong untuk "menjadi inisiator dan penggerak dalam pemberdayaan ekonomi jemaat dan anggota masyarakat secara strategis, terencana, dan transformatif. Injil Kerajaan Allah menjadi visi untuk pengembangan ekonomi masyarakat." Itu sebabnya, GMIT juga terlibat langsung dalam berbagai usaha pengembangan

[55] Gereja Masehi Injili di Timor, *Pengakuan Iman Gereja Masehi Injili Di Timor* (Kupang: Gereja Masehi Injili di Timor, 2007), paragraf 3. Bagian ini mencantumkan, "Ia memberikan kabar baik kepada orang miskin; Memberikan pembebasan kepada orang tertindas; Menghukum para penindas…" Akhir dari Pengakuan Iman juga ditutup dengan kalimat, "Perjamuan kudus adalah wujud persaudaraan kami dalam Kristus Bersama dengan mereka yang miskin dan yang menderita." Kemiskinan merupakan perhatian utama gereja dalam Pengakuan Iman dan Pokok-pokok Eklesiologi GMIT.

[56] Ibid, Bagian B Misi GMIT, pasal 8.

ekonomi masyarakat, baik melalui karya para pendeta maupun secara sinodal.

Catatan kedua, bahwa meski dikelilingi oleh laut, GMIT belum menunjukkan perhatian khusus kepada laut dan isu mengenai laut dalam dokumen Misi. Dalam Bagian B Misi GMIT pasal 17 mengenai lingkungan hidup, perhatian diberikan kepada semua elemen: tanah, air, hutan, laut, udara, dan bukan kepada laut saja. Pada 2021 Fakultas Pascasarjana Universitas Kristen Artha Wacana di Kupang mengadakan konferensi nasional dengan tema Teologi Bercorak Biru Indonesia, dan diikuti oleh 100 peserta secara virtual. Upaya ini dilakukan sebagai kesadaran untuk melihat laut sebagai faktor penting dalam kehidupan warga gereja sekaligus menyadari pentingnya kesadaran untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Beberapa teolog mulai mengangkat pemikiran mengenai pentingnya laut dan kepulauan melalui ekoteologi laut yang diangkat dalam seminar tersebut. Maggang dan Mangililo mengatakan bahwa sudah saatnya laut dilihat sebagai subjek sesama ciptaan Allah untuk mengatasi eksploitasi yang merusak.[57] Dalam studi mengenai Teologi Laut dari Kosmologi Masyarakat Titawaai di Pulau Nusalaut – Maluku, Apituley mengusulkan bahwa laut juga dilihat sebagai mitra kerja Allah.[58] Sementara itu dalam penelitian lain Papasoka dan Damamain mengusulkan bahwa manusia dan laut adalah sesama ciptaan Allah yang berkerabat.[59]

4. KESIMPULAN

Teologi publik di konteks kepulauan harus bicara mengenai alam: tanah dan laut yang memberi kehidupan kepada mereka yang tinggal di dalamnya. Sebagai orang yang tinggal bersama dalam tanah yang sama, dikelilingi oleh lautan yang memberi kehidupan, teologi publik harus fokus kepada tema keadilan dan kesejahteraan untuk pulau tempat tinggal bersama. Sebagai masyarakat kepulauan yang memiliki budaya lebih komunal, model berteologi yang lebih tepat diterapkan adalah *disclosure* dan *factual*, yaitu bukan hanya bicara secara gamblang mengenai apa gereja pandang sebagai tugasnya secara teologis, tapi juga mengambil peran secara nyata demi kesejahteraan pulau tersebut. Kesejahteraan pulau bukan hanya berarti kepentingan manusia, melainkan juga memerhatikan laut sebagai penopang kehidupan dalam ekoteologi kontekstual.

Gereja Masehi Injili di Timor sudah menunjukkan landasan dan cara berteologi yang kuat untuk konteks kepulauan. Provinsi

[57] Elia Maggang, "Menampakkan Corak Biru Kekristenan Indonesia: Sebuah Perspektif Ekoteologi," *Indonesian Journal of Theology* 7, no. 2 (2019): 162–88, https://doi.org/10.46567/ijt.v7i2.149; Kupang News, "Pasca Sarjana Teologi UKAW Gelar Konferensi Nasional Bertajuk Teologi Bercorak Biru Indonesia - Pos-Kupang.Com," December 8, 2021, https://kupang.tribunnews.com/2021/12/08/pasca-sarjana-teologi-ukaw-gelar-konferensi-nasional-bertajuk-teologi-bercorak-biru-indonesia.

[58] Margaretha Martha Anace Apituley, *Teologi Laut: Mendialogkan Makna Laut Dalam Keluaran 14-15 Berdasarkan Kosmologi Masyarakat Titawaai Di Pulau Nusalaut - Maluku Dengan Kosmologi Israel Kun0* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), Bab 4.2.

[59] Natalya Leviana Papasoka and Jafet G Damamain, "Kerabat Laut: Studi Teologi Kontekstual Mitos Eno Karang Di Aru," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 1, no. 1 (2019): 28–40, https://doi.org/10.37429/arumbae.v1i1.180.

NTT memiliki masalah yang multidimensi yang berpusat dan diakibatkan oleh kemiskinan. Kesempatan GMIT untuk terjun langsung dalam permasalahan masyarakat sudah memiliki dasar yang kuat dan kontekstual. Meski demikian, isu mengenai ekoteologi terutama yang berkaitan dengan laut dan harmoni dengan alam sekitar perlu semakin diseriusi.

Penelitian lebih lanjut bagi GMIT mengenai konsep ekoteologi yang berhubungan dengan laut dan tanah sebagai mata pencarian utama masyarakat, juga penelitian mengenai teologi yang menghapus kemiskinan yang memiliki pendekatan solidaritas secara struktural. Penelitian lebih lanjut mengenai gereja dengan konteks kepulauan yang lain juga perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Apituley, Margaretha Martha Anace. *Teologi Laut: Mendialogkan Makna Laut Dalam Keluaran 14-15 Berdasarkan Kosmologi Masyarakat Titawaai Di Pulau Nusalaut - Maluku Dengan Kosmologi Israel Kun0*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.

Baron, Aura Tatiana Ome. "Constructing the Notion of the Maritime Cultural Heritage in the Colombian Territory: Tools for the Protection and Conservation of Fresh and Salt Aquatic Surroundings." New York, 2008. https://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/ome-baron_0708_colombia.pdf.

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Indikator Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020*. Kupang: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020.

———. *Statistik Sosial Dan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020*. Kupang: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020.

Breitenberg, E. Harold. "To Tell the Truth: Will the Real Public Theology Please Stand Up." *Journal of the Society of Christian Ethics* 23, no. 2 (2003): 55–96. https://doi.org/10.5840/jsce20032325.

Breitenberg Jr., E. Harold. "What Is Public Theology?" In *Public Theology for a Global Society: Essays in Honor of Max Stackhouse*, edited by Deirdre King Hainsworth and Scott R. Paeth, 3–17. Grand Rapids, Michigan; Cambridge, UK: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2010.

Brett, Mark G., and Jione Havea, eds. *Colonial Contexts and Postcolonial Theologies: Storyweaving in the Asia-Pacific*. New York: Palgrave Macmillan, 2014. https://doi.org/10.1057/9781137475473.

Cairns, Alan. *Dictionary of Theological Terms*. Belfast; Greenville: Ambassador Emerald International, 2003.

Cooley, Frank L. *Benih Yang Tumbuh XI: Gereja Masehi Injili Di Timor*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 1976.

Cronshaw, Darren. "Exploring Local Church Praxis of Public Theology." *International Journal of Public Theology* 14, no. 1 (2020): 68–96. https://doi.org/10.1163/15697320-12341601.

Filho, Walter Leal, ed. *Climate Change in the Asia-Pacific Region*. Climate Change Management. Cham, Switzerland: Springer, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14938-7.

Gereja Masehi Injili di Timor. *Pengakuan Iman Gereja Masehi Injili Di Timor*. Kupang: Gereja Masehi Injili di Timor, 2007.

———. "Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT." Kupang, 2015.

Graham, Elaine. *Between A Rock and A Hard Place: Public Theology in A Post-Secular Age*. London: SCM Press, 2013.

Haire, James. "Public Theology, A Latin Captivity of the Church: Violence and Public Theology in the Asia-Pacific Context." *International Journal of Public Theology* 1, no. 3&4 (2007): 455–70. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/156973207X231725.

Hansen, Len. *Christian in Public: Aims, Methodologies and Issues in Public Theology*. Cape Town: Sun Press, 2007.

Hardiman, F. Budi, ed. *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" Dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Havea, Sione 'Amanaki. "Christianity in the Pacific Context." In *South Pacific Theology: Papers from the Consultation on Pacific Theology Papua New Guinea, January 1986*, edited by John D'Arcy, 11–15. Oxford: Regnum Books International, 1987.

Hong, Sun Kee. "Biocultural Diversity Conservation for Island and Islanders: Necessity, Goal and Activity." *Journal of Marine and Island Cultures* 2, no. 2 (2013): 102–6. https://doi.org/10.1016/j.imic.2013.11.004.

Howard, Charles Lattimore. *Black Theology as Mass Movement*. New York: Palgrave Macmillan, 2014. https://doi.org/10.1057/9781137368751.

Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di. *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2014-2019*. 1st ed. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2010.

Jacobsen, Eneida. "Models of Public Theology." *International Journal of Public Theology* 6, no. 1 (2012): 7–22. https://doi.org/10.1163/156973212x617154.

Johnson, Lydia. *Drinking From The Same Well: Cross-Cultural Concerns in Pastoral Care and Counseling*. Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2011.

Kambey, Melinda A., Djuwita R.R. Aling, and Christian R. Dien. "Eksistensi Budaya Maritim Kelompok Nelayan Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* 8, no. 1 (2020): 136–46. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/akulturasi/article/view/28979.

Kim, Sebastian. "Public Theology in the History of Christianity." In *A Companion to Public Theology*, edited by Sebastian Kim and Katie Day, 40–66. Leiden; New York: Brill, 2017. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004336063_004.

———. *Theology in the Public Sphere: Public Theology as a Catalyst for Open Debate*. Norwich: Hymns Ancient & Modern Ltd., 2011.

Kim, Sebastian, and Katie Day, eds. *A Companion to Public Theology*. Brill's Companions to Modern Theology. Leiden: Brill, 2017. https://doi.org/10.1163/9789004336063_013.

Klän, Werner. "Aspects of Lutheran Identity: A Confessional Perspective." *Concordia Journal* 32, no. 2 (2006): 133–46.

Kupang News. "Pasca Sarjana Teologi UKAW Gelar Konferensi Nasional Bertajuk Teologi Bercorak Biru Indonesia - Pos-Kupang. Com," December 8, 2021. https://kupang.tribunnews.com/2021/12/08/pasca-sarjana-teologi-ukaw-gelar-konferensi-nasional-bertajuk-teologi-bercorak-biru-indonesia.

Lalleman-de Winkel, Hetty. "The Old Testament Contribution to Evangelical Models for Public Theology." *European Journal of Theology* 14, no. 2 (2005): 87–97.

LOCALISE SDGs. "Provinsi Nusa Tenggara Timur - LOCALISE SDGs Indonesia," 2020. https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17.

———. "Tentang Kami - Localise SDGs Indonesia," 2020. https://localisesdgs-indonesia.org/tentang-kami.

Maggang, Elia. "Menampakkan Corak Biru Kekristenan Indonesia: Sebuah Perspektif Ekoteologi." *Indonesian Journal of Theology* 7, no. 2 (2019): 162–88. https://doi.org/10.46567/ijt.v7i2.149.

McGowan, Andrew T. B. "Church and State: The Contribution of Church History to Evangelical Models for Public Theology." *European Journal of Theology* 14, no. 1 (2005): 5–16.

Moltmann, Jürgen. *God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology*. Translated by Margaret Kohl. London: SCM Press, 1999.

Mukhlis, Suhardi, and Rendra Setyadiharja. "Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 2, no. 1 (2017): 37–51. https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.37-51.

Nainggolan, Poltak Partogi. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya." *Politica* 6, no. 2 (2015): 167–90.

Papasoka, Natalya Leviana, and Jafet G Damamain. "Kerabat Laut: Studi Teologi Kontekstual Mitos Eno Karang Di Aru." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 1, no. 1 (2019): 28–40. https://doi.org/10.37429/arumbae.v1i1.180.

PC(USA) Advisory Council on Discipleship and Worship. "The Confessional Nature of the Church." *The Journal of Presbyterian History* 79, no. 1 (January 2001): 87–102. http://www.jstor.org/stable/23335390.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. *Buku Panduan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia*. Waikabul, Sumba Tengah: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2019.

Pungetti, Gloria. "Islands, Culture, Landscape and Seascape." *Journal of Marine and Island Cultures* 1, no. 2 (2012): 51–54. https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.007.

Rackham, Oliver. "Island Landscapes: Some Preliminary Questions." *Journal of Marine and Island Cultures* 1, no. 2 (2012): 87–90. https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.001.

Satria, Arif. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Bogor; Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Siu-Maliko, Mercy Ah. "Constructing a Samoan Public Theology of Values." University of Otago, 2015.

———. *Embodying Aga Tausili: A Public Theology from Oceania*. Lanham, Maryland: Lexington Books/Fortress Academic, 2021.

Sulistiyono, Singgih Tri, and Yety Rochwulaningsih. "Contest for Hegemony: The Dynamics of Inland and Maritime Cultures Relations in the History of Java Island, Indonesia." *Journal of Marine and Island Cultures* 2, no. 2 (2013): 115–27. https://doi.org/10.1016/j.imic.2013.10.002.

Tomlinson, Matt. *God Is Samoan: Dialogues between Culture and Theology in the Pacific*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2020.

Tuwere, Ilaitia Sevati. *Vanua: Towards a Fijian Theology of Place*. Suva; Auckland: Institute of Pacific Studies at the University of the South Pacific & College of St. John the Evangelist, 2002.

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. "Addressing Climate Change Education for Sustainable Development." *Experts Meeting on Climate Change: Education for Sustainable Development in Asia and Pacific*. Manila: Unesco, 2014. https://en.unesco.org/events/experts-meeting-climate-change-education-sustainable- development-asia-and-pacific.

Volf, Miroslav. *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Grand Rapids, Michigan: Brazos Press, 2011.

Watloly, Aholiab. "Konsep Diri Masyarakat Kepulauan." *Filsafat* 22, no. 2 (2012): 120–48.